

The Role Of Village Government In The Existence Of Gapoktan In Kedung Banteng Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency

[Peran Pemerintah Desa Dalam Eksistensi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo]

Putri Amaliatul Azizah¹⁾, Ilmi Usrotin Choiriyah^{*,2)}

^{1,2)}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstract. *Villages have a big role in providing services to realize a prosperous community life. Pujiharto defines GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) as a group consisting of farmer fathers whose scope is from the same village. In this study took the location of Kedung Banteng Village, Tanggulangin Subdistrict, Sidoarjo Regency with the consideration that Kedung Banteng Village, although the majority of the population earns a living as a fishery and there are also farmers. The problems that occur in Kedung Banteng Village are related to the problem of settling waters and land subsidence which makes it difficult for them to plant seeds. This research uses qualitative methods. The method has the final result in the form of descriptive data in the form of oral and written information from a person and the results of observing behavior. The technique used is purposive sampling or using consideration as a technique for determining sources as research samples. The results of research with Gapoktan members show that the Kedung Banteng village government must provide concrete evidence regarding the problems faced by the community. The importance of the Agriculture Office issuing local regulations governing the empowerment of farming communities remembers the government in order to encourage food security and the welfare of farmers.*

Keywords – Role, Village government, Farmer Group Association

Abstrak. *Desa mempunyai peran yang besar untuk menyediakan pelayanan demi mewujudkan hidup masyarakat yang sejahtera. Dalam penelitian ini mengambil lokasi Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa Desa Kedung Banteng meskipun mayoritas penduduknya bermata pecaharian sebagai perikanan dan ada juga sebagai petani. Permasalahan yang terjadi di desa Kedung Banteng yaitu terkait permasalahan perairan yang mengendap dan penurunan tanah yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan penanaman bibit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut memiliki hasil akhir berupa data secara deskripsi dalam bentuk informasi lisan serta tertulis dari seseorang serta hasil pengamatan perilaku. Teknik yang digunakan yaitu purposive sampling atau menggunakan pertimbangan sebagai teknik penentu narasumber sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian dengan Anggota Gapoktan menunjukkan bahwasanya Pemerintah desa Kedung Banteng harus memberikan bukti nyata terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pentingnya Dinas Pertanian mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat petani mengingat pemerintah agar mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Hasil dan pembahasan yang didapatkan setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam memberdayakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan dibuktikan dari pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, serta berbagai pelayanan yang menjadi penunjang petani di Desa Kedung Banteng. peran dari pemerintah desa tersebut telah terlaksana dengan baik dengan masih dapat lebih dimaksimalkan kembali. Apabila merujuk dari UU No.6 Th. 2014 mengenai Desa serta PP No. 19 Th. 2013 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.*

Kata Kunci – Peran, Pemerintah Desa, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia, Sebagian masyarakatnya merupakan bagian dari masyarakat agraris sehingga perannya memiliki kontribusi yang besar untuk Pembangunan Nasional terutama dalam sektor pertanian, hal ini dibuktikan dengan pendapatan yang didapatkan oleh mereka sebagian besar hasil dari produk pertanian contohnya perkebunan, tanaman pangan, perikanan, peternakan, serta kehutanan [1] . Namun, pada realitanya yang membangun bidang pertanian di Indonesia sebagian besar merupakan petani yang memiliki skala usaha relatif kecil [2]. Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah serta pendirian kelompok GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang berperan melihat tingkat keadaan pertanian di Indonesia.

Desa mempunyai peran yang besar untuk menyediakan pelayanan demi mewujudkan hidup masyarakat yang Sejahtera. Hal ini disebabkan kewenangan secara umum dari pemerintah desa yaitu dapat mengatur kehidupan masyarakat secara strategis atau telah terikat aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan termuat dalam UU No. 6 Th. 2014 mengenai Desa. Soejono Soekanto (2012:212) berpendapat, bahwa aspek dinamis kedudukan (status) adalah peran, jika kewajiban dan hak seseorang dilaksanakan sesuai kedudukannya, hal tersebut sama dengan melakukan perannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan definisi peran yaitu individu yang memiliki kedudukan serta melakukan hak dan kewajibannya.

Pujiharto mendefinisikan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai kelompok yang beranggotakan bapak tani yang ruang lingkupnya dari desa yang sama. Kelompok ini merupakan pengusaha di bidang agribisnis dengan prinsip kemitraan serta kebersamaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan serta produksi usaha tani untuk anggota serta petani lainnya.

Kelompok tani terbentuk dari hasil surat keputusan serta memiliki visi menjadi ruang para petani untuk berkomunikasi. Kemudian kelompok” ini digabung menjadi GAPOKTAN sesuai PERMENTAN No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 memiliki tujuan untuk secara kooperatif, menggalang kepentingan bersama supaya kelompok ini daya memiliki daya serta berhasil guna [3] . Pembentukan kelompok ini terbentuk melalui musyawarah dengan peserta yang hadir minimal adalah ketua kelompok/ kotak tani yang akan bergabung, dengan masing-masing bersama para anggota kelompok telah menyetujui untuk menjadi bagian GAPOKTAN.

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa Desa Kedung Banteng meskipun mayoritas penduduknya bermata pecaharian sebagai perikanan dan ada juga yang bermata pencaharian sebagai petani . Desa Kedung Banteng memiliki komunitas kelompok tani sebanyak 2 kelompok yang tergabung kedalam Gabungan Kelompok Tani di tingkat desa dengan nama Gapoktan “Sri Rejeki”. Gapoktan Sri Rejeki terbagi menjadi 2 kelompok yaitu Gapoktan Sri Rejeki 1 dan 2. Gapoktan Sri Rejeki 1 terdiri dari blok jambe, kulon omah dan wetan omah. Sedangkan gapoktan Sri Rejeki 2 terdiri dari blok sepat, blok balong kebo dan blok terus. Sayangnya dari kedua nama komunitas tersebut hanyatinggal beberapa blok saja yang sampe sekarang masih beroperasi. Hal itu terjadi karena banyaknya masyarakat yang memilih beralih di sector perikanan dan pesawahan diubah menjadi tambak.

TABEL 1.1: REKAPITULASI LUAS TANAH SAWAH SERTA JUMLAH ANGGOTA KELOMPOK TANI DI DESA KEDUNG BANTENG

Nama Kelompok	Gabungan	Jumlah Anggota	Luas Sawah
Poktan Blok Sepat		13 Orang	25 Ha
Poktan Balong Kebo		8 Orang	10 Ha
Poktan Blok Terus		11 Orang	15 Ha

Sumber : Diolah oleh penulis

Berdasarkan table diatas Luas sawah di Desa Kedung Banteng sekitar 99.415 Ha. Akan tetapi tidak sepenuhnya luas sawah 99.415 digunakan untuk penanaman dikarenakan sudah ada tanah sawah yang dijadikan tambak. Para Gapoktan didesa Kedung Banteng hanya menjadi 3 tempat sawah yaitu Poktan Blok Sepat , Poktan Blok Balongkebo dan Poktan Blok Terus dengan keseluruhan menjadi 32 anggota kelompok tani.

Dalam sektor pertanian desa Kedung Banteng juga memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan desa desa lainya yang berada di Kecamatan Tanggulangin. Perbedaan tersebut bisa diketahui dari beberapa kali untuk melakukan penanaman bibit. Desa Kedung Banteng sendiri hanya bisa melakukan penanaman 1 tahun sekali pada saat musim kemarau saja jika disaat musim hujan mereka sangat kesulitan untuk melakukan penanaman dan untuk desa lainya mereka bisa melakukan penanaman 2-3 kali hal itu yang sampe saat ini menjadi pembeda antara penanaman bibit didesa kedung Banteng dan desa desa yang lain. Permasalahan yang terjadi didesa Kedung Banteng yaitu terkait permasalahan perairan yang mengendap dan penurunan tanah yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan penanaman bibit. Masyarakat beranggapan bahwa penurunan tanah ini disebabkan adanya pengeboran gas yang terjadi didesa Kedung Banteng. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan kebenaran dikarenakan sampai saat ini belum ada pembuktian secara signifikan akibat terjadinya penurunan tanah didesa Kedung Banteng. Penurunan tanah ini juga memiliki pengaruh terhadap perairan didesa Kedung Banteng dikarenakan saat petani melakukan penanaman bibit perairan yang mengendap dan tidak ada celah mengakibatkan tanah yang sudah mulai ditabur benih sangat sulit untuk mengembangkan bibitnya dan para petani terus mengalami kegagalan dan belum pernah sama sekali ada yang berhasil hingga saat ini.

Dalam mewujudkan permasalahan penanaman bibit didesa Kedung Banteng antara pemerintah desa dan masyarakat memiliki konflik yang dimana waktu peneliti melakukan penelitian terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dan juga pemerintah desa. Pemerintah desa beranggapan bahwa mereka sudah melakukan strategi untuk mengatasi permasalahan terkait sektor pertanian. Strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi setiap ingin melakukan penanaman bibit serta selalu mengunjungi sawah sawah yang ada didesa Kedung Banteng. Pemerintah desa beranggapan bahwa para petani didesa Kedung Banteng mereka memiliki rasa kebersamaan yang kurang jika dibandingkan dari sektor pertanian didesa yang lainya. Peneliti juga sempat berkunjung ke sawah untuk berbicara langsung dengan para petani. Terkait tanggapan dari pemerintah desa hal itu ditolak keras oleh para petani didesa Kedung Banteng dikarenakan strategi para pemerintah yang selama ini mereka asumsikan kepada public itu tidak sepenuhnya terbukti. Tindakan terkait hal tersebut sama sekali tidak ada pembuktian hingga sampai saat ini. Para petani beranggapan bahwa pemerintah desa hanya mengusahakan saja tetapi tiada bukti nyata.

Adapun hal yang membuat para petani mengalami keresahan, mereka harus membayar pajak dengan tepat waktu tetapi mereka juga sangat lelah karena terus mengalami kerugian. Para petani juga sempat didatangi oleh pegawai dari Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Sidoarjo para pegawai memberikan pendapat kepada para petani bahwa harusnya mereka sudah ada pembagian bibit benih gratis tetapi jika mereka mengambil di balai desa mereka dikenakan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Peneliti juga tidak membenarkan asumsi dari satu pihak saja jika dilihat dari bukti nyata para pemerintah desa sudah memberikan bantuan mesin tetapi mereka hanya memberikan alatnya saja tidak dengan bahan bakar untuk menghidupkan mesinya. Atas permasalahan dan kurangnya pembuktian serta kurangnya komunikasi baik dari pemerintah desa dengan para petani maka dari itu

dibutuhkan adanya peran pemerintah dikarenakan sampai saat ini para petani beranggapan bahwa kita para Gapoktan yang mandiri tanpa memberitahu keluhan apa saja yang sudah dirasakan karena mereka telah beranggapan bahwa semua yang mereka keluhkan menjadi sia sia [4]

Peran Pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan petani yang telah tersalurkan di masyarakat masih mengalami permasalahan yang begitu kompleks di lapangan. Hal ini dapat dilihat bahwa harapan dan kenyataan jauh berbanding terbalik apa yang diharapkan petani dengan bantuan yang diberikan pemerintah [5]. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Gapoktan di desa Kedung Banteng kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidorarjo belum berjalan dengan baik [6]. Sehingga pada tahun 2021 pemerintah desa melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa upaya pemerintah untuk melakukan upaya seperti penanaman bibit dengan melalui program pelatihan pembuatan pupuk. Program pelatihan pembuatan pupuk berjalan setiap 2 tahun sekali. Pemerintah desa berperan penting dalam menciptakan program ini dikarenakan adanya Pencemaran dan kerusakan lahan pertanian makin meningkat sejalan dengan penggunaan dosis tinggi pupuk kimia oleh para petani. Para petani juga menikmati manfaat dari adanya program pelatihan tersebut dikarenakan bagi mereka yang memiliki usia sekitar 50 th mereka akan merasa kesulitan jika hanya melihat tutorial dari media social. Maka dari itu pemerintah desa harus selalu memiliki peran penting dalam mewujudkan program program yang ada di desa.

Adapun penelitian terdahulu yang telah digunakan oleh peneliti lainnya untuk digunakan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian saat ini diantaranya penelitian oleh Abdul Malik tahun 2020 tentang “Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Rukun Santoso Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Kajarharjo”

Pertama, Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah dengan melalui beberapa tahapan pemilihan topik, heuristic, kritik sumber (intern dan extern), interpretasi dan historiografi. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan sosiologi-ekonomi yaitu merupakan suatu pendekatan yang dimana menganalisis tentang kajian individual atau kelompok yang melakukan interaksi dalam proses pembenahan keutuhan. Dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa data data yang sudah dipaparkan sudah sangat jelas dan mudah untuk dimengerti. Kesimpulan yang diambil yaitu untuk meningkatkan kualitas para petani mereka telah melakukan berbagai cara dengan mengadakan penyuluhan dengan harapan adanya penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil panen para petani. Hal yang membedakan dengan penelitian saat ini yaitu peran yang dimiliki oleh para Gapoktan sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai kebersamaan kinerja Gapoktan dengan Pemerintah Desa yang berada di Kedung Banteng.

Selanjutnya, yaitu Data peneliti oleh Anggreyni Raintun, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow” pada tahun 2021 [7]. Penelitian terdahulu dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Data Primer yang meliputi Observasi, Wawancara kemudian data sekunder yakni Studi Pustaka. Peneliti terdahulu dengan saat ini sama menggunakan metode penelitian kualitatif [8]. Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan saat ini dilihat dari Teknik penentu informan dimana peneliti terdahulu melakukan wawancara Bersama Ketua Gapoktan dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) sedangkan peneliti saat ini hanya wawancara Bersama Pemerintah desa dan kelompok tani.

Terakhir, Data Peneliti oleh Muhammad Viki Nisfani Al Azis yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi” pada tahun 2022. Penelitian Terdahulu dengan saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk menggambarkan penelitian Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini terletak pada data yang didapatkan. Peneliti terdahulu mencantumkan data yang kurang karena disana tidak mencantumkan dokumentasi hanya penilaian terhadap beberapa indikator saja sedangkan peneliti saat ini beberapa indikator memiliki data tersendiri [6]

Untuk menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan petani didesa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo peneliti telah menggunakan teori peran yang dikemukakan Menurut Arif dalam Adhawati (2012:9) Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi 4 indikator peran yaitu: Peran pemerintah sebagai Regulator, Peran pemerintah sebagai Dinamisator, Peran pemerintah sebagai Fasilitator, Peran pemerintah sebagai Katalisator [4] Adanya peran pemerintah merupakan hal yang wajib diterapkan baik dari segi fisik maupun materi. Untuk menanggapi permasalahan gapoktan didesa Kedung Banteng peran pemerintah desa selalu memberikan arahan dan support meskipun sering mengalami kegagalan harus tetap melakukan penanaman agar tidak sempat dibiarkan begitu saja. Adapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa dan Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.2 : Jenis Bantuan Program Pembuatan Pupuk

No	Jenis Bantuan	Tahun	Jumlah
1	Mesin Traktor	2013	1 Buah
2	Pompa Air Irigasi	2016	3 Buah
3	Bantuan Bibit	2021	1500 Kg

Sumber : Diolah oleh Penulis

Berdasarkan table diatas bantuan yang diberika oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo sudah dimanfaatkan dengan baik Bantuan mesin tractor digunakan secara bergantian oleh para anggota kelompok tani dalam tempat lahan sawah yang berbeda [9] . Bantuan pompa air irigasi juga dimanfaatkan oleh para Gapoktan dikarenakan meskipun penanaman belum bisa dikatakan berhasil peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan sudah cukup baik. Pada tahun 2022 mereka juga mendapatkan pengajuan bantuan bibit yang dimana bantuan tersebut ditolak oleh Gapoktan Kedung banteng dikarenakan mereka memberikan bibit pendek dan itu kurang cocok jika ditanami di area pesawahan desa Kedung Banteng dengan kondisi air perairan dan penurunan tanah. Para Gapoktan juga mendapatkan bantuan dari Desa. Bantuan dari desa untuk para Gapoktan berupa Pembuatan Rumah Burung Hantu yang bertujuan untuk menghilangkan Tikus setiap tahun sekali dengan tinggi diatas 6 Meter dan setiap Tahun mereka melakukan Pegumpanan Tikus. Namun, bantuan yang diberikan pemerintah desa belum bisa dimanfaatkan oleh para kelompok tani didesa Kedung Banteng dikarenakan kurangtepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh para Gapoktan [10]. Atas hal tersebut Peran Pemerintah Desa dalam Eksistensi Gapoktan dinilai masih kurang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih tempat penelitian di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan Gapoktan di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Eksistensi Gapoktan Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut memiliki hasil akhir berupa data secara deskripsi dalam bentuk informasi lisan serta tertulis dari seseorang serta hasil pengamat perilaku (Sugiyono, 2007:15). Pada penelitian ini fokusnya adalah terkait dengan “ Peran Pemerintah Dalam Eksistensi Gapoktan”. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Tanggulangin, tepatnya di Desa Kedung Banteng. Teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* atau menggunakan pertimbangan sebagai teknik penentu narasumber sebagai sampel penelitian. Narasumber pada penelitian ini yaitu dua perwakilan Pemerintah Desa serta satu perwakilan Anggota Gapoktan dan Agen kios pupuk. Dalam hal mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan wawancara yang kemudian menjadi sumber data primer, serta dokumentasi. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan merupakan hasil dari studi kepustakaan daei dokumen-dokumen, artikel ilmiah, buku, dan berita yang berasal dari media massa yang disesuaikan dengan topik yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan teori 4 indikator yang telah disampaikan oleh Arif yang dikutip dari

Adhawati (2012:9) adalah yang Pemerintah memiliki peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, serta katalisator. Untuk menganalisis data atau mengelola data penelitian digunakan Teknik kualitatif dengan model interaktif yang telah dijelaskan pada Miles & Huberman (1994), yang terdiri dari data dikumpulkan, kemudian direduksi, yang kemudian data disajikan, hingga kemudian dicapai hasil kesimpulan. Sehingga Langkah dalam metode penelitian yang dilakukan diawali dari melakukan pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi, kemudian melakukan pemilihan data atau proses reduksi, kemudian data dari hasil pencatatan di lapangan di transformasi dan disederhanakan dipilih yang sesuai dengan topik permasalahan yang dibahas, selanjutnya hasil data tersebut dibanding dengan kajian teori serta penelitian yang sudah ada sebelumnya atau biasa disebut proses penyajian data. Langkah terakhir yaitu menyimpulkan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan.

III. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan amanat yang telah disampaikan melalui UU No. 6 Th. 2014 terkait Desa tepatnya dalam pasal 18, telah dijelaskan terkait kewenangan desa sebagai pelaksana pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa yang diselenggarakan dengan adat istiadat, hak asal usul, serta prakarsa masyarakat Desa. Hal tersebut yang menjadi latar belakang pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dalam rangka melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan pemerintah desa dalam menjalankan peran untuk memberdayakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, maka dengan mengaplikasikan teori Peran Pemerintah penulis menggunakan 4 indikator disampaikan oleh Arif pada Adhawati (2019:9), bahwa pemerintah berperan menjadi Dinamisator, Regulator, Katalisator, serta Fasilitator.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Dalam berperan menjadi Regulator, pemerintah memiliki kewajiban dalam mengatur persiapan serta keseimbangan pembangunan dengan mengarahkan sehingga dapat terselenggara dan diterbitkan peraturan-peraturan. Selain itu, tugas lainnya berkaitan dengan peran dari pemerintah dalam menyampaikan acuan dasar bagi masyarakat dengan fungsi menjadi alat yang membantu meregulasi segala aktivitas program pemberdayaan. Program serta aturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan pemberdayaan kelompok tani, disertai dengan acuan dasar yang kemudian bisa diartikan oleh masyarakat sebagai alat yang memberikan aturan dalam setiap aktivitas pemberdayaan yang dilaksanakan untuk kelompok tani. Terkait dengan hal tersebut, implementasi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui pembentukan GAPOKTAN serta pemberian pelatihan serta penyuluhan sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat dengan profesi petani di Desa Kedung Banteng. Dengan dibentuknya GAPOKTAN memberikan dukungan aktivitas pertanian dari masyarakat. Selain itu, juga memudahkan pemerintah untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana penunjang untuk memfasilitasi aktivitas pertanian. Namun, dalam realitanya terkait dengan arahan atau aturan dari pemerintah masih kurang didapatkan sehingga sampai sekarang rasa kepedulian dari pihak pemerintah sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Padahal hal tersebut menjadi peran yang sangat penting bagi pemerintah karena merupakan kebutuhan dalam mewujudkan peningkatan pemberdayaan.

Salah satu peran yang dilakukan pemerintah serta telah dirasakan serta memberikan pengaruh yang menyeluruh yaitu dalam aspek pembuatan kebijakan. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah di dalam strata pertanian memberikan pengaruh yang besar pada berbagai upaya mengelola aktivitas pertanian masyarakat untuk mewujudkan keterbaharuan berbagai inovasi terkait pertanian yang berfungsi mewujudkan peningkatan tingkat pemberdayaan. Rujukan yang digunakan oleh Desa Kedung Banteng dalam memberdayakan masyarakat profesi petani yaitu peraturan yang sifatnya umum yaitu UU No. 6 Th. 2014 mengenai Desa dan UU No 19 Th.2013 tepatnya pada pasal 19 ayat 4 menjelaskan terkait kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan kepada GAPOKTAN, petani dan kelompok tani untuk mewujudkan sarana produksi pertanian yang memberikan hasil berkualitas. Selain itu pada UU tersebut telah diatur terkait pemberdayaan dan perlindungan petani yang terdiri dari perlindungan, perencanaan, pembiayaan dan pendanaan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, pengawasan dari masyarakat profesi petani dengan penyelenggaraannya didasarkan pada asas kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, kebermanfaatn, keterbukaan, keterpaduan, berkelanjutan, serta efisiensi-berkeadilan. Hal lainnya yang di atur dalam aturan tersebut berkaitan dengan pemerintah daerah dan pusat yang memiliki kewajiban memberikan dorongan dan fasilitas untuk petani supaya bergabung dalam asuransi petani yang

bermanfaat agar petani mendapatkan perlindungan dari gagal panen yang disebabkan dampak perubahan iklim, serangan organisme, bencana lama serta jenis risiko lainnya yang dapat menimbulkan kerugian. Dengan memberdayakan serta melindungi petani, maka dapat terwujud tujuan kemandirian serta kedaulatan petani sebagai langkah peningkatan kualitas, taraf kesejahteraan kehidupan petani menuju lebih baik. Selain itu, juga petani dapat terlindungi dari risiko harga akibat gagal panen serta terfasilitasi sarana prasarana pertanian sesuai kebutuhan pengembangan usaha tanidna juga meningkatkan tumbuh kembang lembaga yang berhubungan dengan pembiayaan pertanian dalam memberikan pelayanan kepentingan usaha tani. Berdasarkan peraturan umum tersebut peneliti sudah melakukan wawancara mengenai tingkat kepedulian pemerintah desa dengan anggota Gapoktan apakah sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani” atau masih kurang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Rahman selaku sekretaris desa beliau menjelaskan bahwasanya : *“Pemerintah desa telah melakukan Musyawarah Perencanaan Penetapan penanaman bibit dan memunculkan program pelatihan pembuatan pupuk untuk merencanakan pemberdayaan dengan tujuan memajukan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkan dan menguatkan kelompok tani di Desa Kedung Banteng supaya mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam kegiatan usaha tani”*.

Jika dilihat dari peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 T entang Desa dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap masyarakat petani di Desa Kedung Banteng. Jika dikaitkan dengan pemberdayaan menurut Bapak Misnan selaju anggota Gapoktan menjelaskan bahwasanya:

“Pemerintah hanya sebatas memberikan intruksi saja yang nyatanya itu tidak sepenuhnya bisa mengatasi keluhan yang dirasakan para Gapoktan, pemerintah juga sering mengadakan musyawarah dan guna untuk memberikan perlindungan terhdap tingkat kendala yang dirasakan oleh para gapoktan dan nyatanya musyawarah antara pemerintah dengan gapoktan hanya berlaku sekejap saya tanpa ada bukti nyata terkait hasil musyawarah yang sudah dilakukan maka dari itu para anggota Gapoktan harus mengatasi semuanya sendiri ”

Hasil wawancara peneliti dengan Anggota Gapoktan menunjukan bahwsanya Pemerintah desa Kedung Banteng harus memberikan bukti nyata terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pentingnya Dinas Pertanian mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat petani mengingat pemerintah agar mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, Pemerintah desa harus lebih memperhatikan peraturan yang berpihak kepada masyarakat tani agar petani di Desa Kedung Banteng lebih sejahtera”. Peranan pemerintah sebagai Regulator jika dikaitkan dengan Peneliti Terdahulu dari [11] berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow” juga menerapkan bentuk peranan Regulator akan tetapi pada peneliti sebelumnya untuk tingkat pemberdayaan mereka menciptakan program serta pelatihan melalui anggota PPL sedangkan peneliti saat ini yang menciptakan program serta pelatihan dari pemerintah desa sendiri. Tak hanya itu dalam penelitian terdahulu peranan pemerintah masih belum maksimal terkait dengan tingkat musyawarah.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Sebagai Dinamisator, pemerintah dapat melaksanakan perannya dengan mempunyai kompetensi untuk menyediakan pengarahan, bimbingan, serta kemampuan dalam menarik masyarakat untuk bergabung supaya dapat melahirkan masyarakat yang peduli, serta memberikan partisipasi secara aktif pada setiap pembangunan. Implementasi peran yang dilakukan dengan memberikan secara efektif dan intensif berupa pembinaan untuk masyarakat. Adanya pengarahan serta pembinaan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat profesi petani [12]. Selain itu, juga memiliki manfaat dalam pemeliharaan dinamika badan tertentu dalam membina masyarakat.

Tuntutan bagi pemerintah berkaitan dengan pemberian solusi dari hambatan yang dimiliki oleh kelompok tani serta pemberian motivasi agar kelompok tani dapat secara maksimal dalam perkembangan potensinya serta memberikan perhatian pada setiap anggota kelompok tani yang memiliki keluhan. Dalam hal ini peran pemerintah adalah dalam efektifitas sebagai motor penggerak dalam upaya pembangunan aktivitas pertanian masyarakat, hal ini disebabkan karena lingkungan dapat terpengaruh oleh sifat kepekaan yang dimiliki oleh kelompok tani. Oleh sebab itu, pemberian bimbingan serta motivasi pada kelompok tani menjadi peran dari pemerintah yang sangat dibutuhkan karena dapat berpengaruh dalam perbaikan kualitas pemerintah dan lingkungan serta mempersiapkan arahan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan seimbang. Tujuan dari segala upaya pemberdayaan yang dilaksanakan agar memberikan pengaruh pada aktivitas pertanian di masyarakat, dengan hasil akhirnya bisa mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik pada lingkungan hidup masyarakat, yaitu dalam bentuk kemandirian serta masyarakat kelompok tani yang mampu beradaptasi dalam persaingan di dunia pasar. Dalam rangka mewujudkan pemberdayaan yang berhasil, maka peran aktif pemerintah desa dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sifat demokratis perlu ditegakkan pemerintah agar dapat menggerakkan berbagai komponen internal serta eksternal agar dapat bangkit dan berperan aktif pada upaya pemberdayaan.

Dalam upaya pembangunan aktivitas pertanian masyarakat, efektifitasnya dapat ditingkatkan melalui peran pemerintah sebagai penggerak. Hal ini dikarenakan lingkungan dapat terpengaruh oleh sensitifitas dari kelompok tani, sehingga bimbingan dan motivasi menjadi peran pemerintah yang sangat dibutuhkan agar dapat memberikan pengaruh kepada kelompok tani dalam upaya perbaikan lingkungan serta mutu hidupnya. Selain itu, juga dibutuhkan arahan dari pemerintah untuk tetap mempertahankan keseimbangan dalam menyelenggarakan pembangunan. Sebagai dinamisator, peran dari pemerintah adalah terkait dengan pemberian arahan dan bimbingan yang menyeluruh dan efektif dengan sasaran seluruh masyarakat tanpa memandang strata sosial ataupun perbedaan yang terdapat di masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan dikarenakan selaras dengan kebutuhan dari masyarakat, sehingga dengan upaya yang dilakukan tersebut harapannya dinamika pemerintah di masyarakat dapat terpelihara dengan perantara penyuluh maupun Lembaga pemerintah di bidang tertentu yang bertugas mengarahkan serta membimbing dan melatih masyarakat profesi tani.

GAMBAR 1. PENETAPAN PENANAMAN BIBIT BERSAMA PARA ANGGOTA GAPOKTAN.



Sumber : *Diolah Penulis 2023*

Data kejelasan diatas dibuktikan bahwa pemerintah desa Kedung Banteng dalam melaksanakan pemberdayaan mengundang para anggota Gapoktan untuk memberikan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas petani melalui sosialisasi. Definisi dari sosialisasi adalah bentuk komunikasi dengan tujuan menjelaskan arti dari berbagai kegiatan yang dilakukan sehingga menjadi upaya untuk berdialog Bersama masyarakat. Dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat Desa Kedung Banteng, pemerintah pada dasarnya mengadakan pertemuan bersama anggota kelompok tani atau GAPOKTAN dengan melakukan pembahasan terkait dengan kendala atau masalah yang terjadi pada aktivitas pertanian masyarakat sehingga bisa didapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada serta petani bisa mendapatkan pengarahan dari pemerintah sebagai solusi dari berbagai masalah yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, masyarakat di Desa Kedung Banteng sebagian masung kurang antusias dikarenakan kendala mengenai belum maksimalnya bukti nyata yang pemerintah berikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku sekretaris desa bahwasanya :

“ Saat ini pemerintah desa hanya fokus terhadap kendala yang dirasakan oleh para petani seperti penanaman bibit yang selalu mengalami gagal panen dan lain sebagainya dan untuk Pemberdayaan petani masih kurang berjalan dikarenakan pemerintah desa juga jarang sekali menyelenggarakan program pelatihan hal itu terjadi karena kurangnya dukungan dari Kepala Desa. Akan tetapi, saat ini pemerintah desa sedang berusaha untuk selalu mewujudkan pemberdayaan gapoktan melalui pembuatan perencanaan terkait pelatihan yang akan diajukan kepada Kepala Desa ”.

Pernyataan tersebut menurut peneliti selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Misnan selaku anggota Gapoktan bahwasanya : *“Pemerintah desa hanya memberikan penyampaian saja dan pemerintah juga jarang menciptakan sebuah program pelatihan. Padahal kami para anggota gapoktan dengan umur yang sudah cukup tua membutuhkan banyak pelatihan serta bimbingan dan jika liat di media social kami merasa kesulitan untuk mencernanya. Hal tersebut yang membuat para anggota gapoktan merasan jenuh jika untuk mendatangi pertemuan yang diadakan oleh pemerintah dan para anggota gapoktan merasa bahwa semua itu merasa sia sia.*

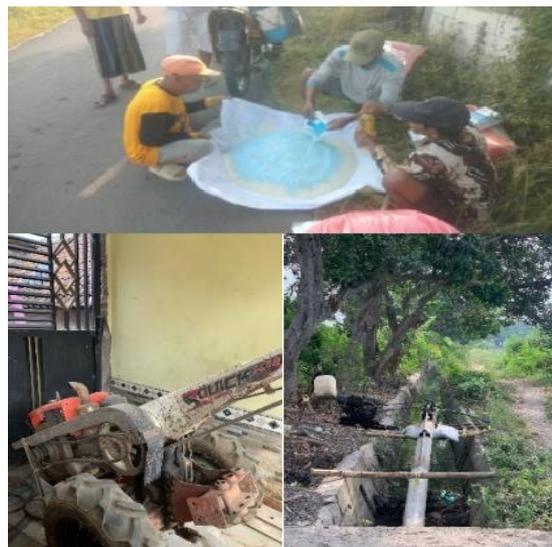
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti bahwa pemerintah sebagai dinamisor telah berupaya mempengaruhi masyarakat untuk ikut masyarakat dalam guna pemberdayaan menunjang keberhasilan aktivitas pertanian yang ada di Desa Kedung Banteng, Namun peranan sebagai Dinamisator masih belum maksimal dikarenakan kurangnya pengarahan/bimbingan. Pemerintah juga telah mengajukan bantuan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Sidoarjo akan tetapi bantuan yang diberikan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan petani yaitu pemberian bantuan bibit pendek yang tidak sesuai dengan kondisi tanah lahan yang ada didesa Kedung Banteng, karena pembentukan ini tidak sesuai dengan keperluan petani. Sehingga membuat partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan sangat rendah [11]. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu menurut [11] berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow” dengan indikator yang sama juga mengalami permasalahan terkait kurangnya bimbingan atau pengarahan pada kelompok tani terkait dengan tingkat keaktifan dalam memberikan bimbingan atau pengarahan dari pemerintah yang membuat para anggota petani merasa kesulitan dalam mengatasi permasalahanyang dialami.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam hal terciptanya situasi Pembangunan (menjadi jembatan dalam kepentingan pihak-pihak untuk Pembangunan daerah yang optimal) supaya terlaksana secara kondusif. Dalam hal ini pemerintah perlu mengusahakan dalam terciptanya atau memberikan fasilitas kondisi yang aman, nyaman, serta tertib termasuk juga terfasilitasi dalam hal sarana dan prasarana pembangunan seperti permodalan/pendanaan serta pembinaan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran pemerintah dalam menghubungkan kepentingan masyarakat menuju pemerintah dan juga sebaliknya serta suasana pembangunan dapat terlaksana secara kondusif terkait dengan aktivitas pembangunan daerah yang dapat terlaksana optimal. Peran pemerintah dalam hal ini juga menjadi agen yang bertanggung jawab tercipta dan tersedianya fasilitas dengan kondisi nyaman, tertib, serta aman disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang disediakan dalam hal ini merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembangunan baik untuk terkhusus pada sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Pergerakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah memberikan pendampingan dengan melatih keterampilan, meningkatkan Pendidikan, serta memberikan modal sebagai pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam kegiatan memabngun desa dibutuhkan tunjangan aktivitas ini sangat dibutuhkan peran dari pemerintah sebagai fasilitator, tidak hanya terkait dengan menyediakan sarana, namun juga melakukan pengadaan prasarana yang masih dibutuhkan dan jumlahnya kurang seperti pupu yang sangat krusial dalam aktivitas pertanian karena memberikan pengaruh yang besar. Hal ini dikarenakan, di Indonesia pupuk menjadi berhubungan secara langsung dengan kebutuhan lahan pertanian dan masih menjadi salah satu topik masalah yang terjadi seputarpertanian. Selain itu, pemberian bimbingan non teknis maupun secara teknis agar dapat menjadi pendorong dan pemberdayaan masyarakat kelompok tani juga harus disediakan oleh pemerinyah supaya kelompok tani dapat mengelola dan melkaukan pembangunan secara mandiri sarana dan prasarana pemberdayaan, dan dapat melakukan kegiatan pendukung lainnya secara mandiri. Bentuk bantuan yang disediakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Sidoarjo.

Gambar 2. Bantuan Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Sidoarjo



Sumber : *Diolah penulis 2023*

Desa telah memberikan bantuan berupa Mesin Traktor dan juga Pompa air irigasi mereka juga pernah memberikan bantuan bibit pada tahun 2021 sayangnya bantuan bibit tidak tepat sasaran. Tidak hanya itu, pemerintah Desa Kedung Banteng sudah merencanakan saat program ketahanan pangan berupa pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas masyarakat petani. Fasilitas tersebut digunakan dengan baik oleh para Gapoktan. Pemerintah Desa Kedung Banteng dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani perlu dibantu oleh pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur suatu wilayah, wajib melaksanakan dan memberikan pelatihan, fasilitas, sarana dan prasarana serta persediaan modal guna meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat petani. Menurut hasil wawancara Bapak Rahman selaku sekretaris desa beliau berkata bahwasanya:

“Pemerintah desa kedung Banteng sudah responsif dimana pemerintah desa sudah melakukan apa yang sesuai dengan kebutuhan para petani. Akan tetapi kurang responsive terkait dengan permodalan dikarenakan keterbatasan anggaran dan kurangnya perhatian dari Kepala Desa. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah saja. Saat ini Pemerintah desa perlu membuat anggaran administrasi tetapi dikarenakan para anggota Gapoktan rata rata berumur sudah diatas 50 tahun pemerintah desa merasa kesulitan untuk memberikan Amanah kepada para Gapoktan”.

Peneliti sudah sempat mewawancarai Bapak Misnan selaku anggota Gapoktan beliau membenarkan penjelasan dari pemerintah desa bahwasanya: *“Alhamdulillah jika untuk bantuan dari dinas Pertanian , Perternakan dan Perkebunan di Kabupaten Sidoarjo sudah bisa digunakan dengan baik akan tetapi terkait permodalan pemerintah desa bisa dikatakan kurang baik dikarenakan setiap ingin mengambil bantuan mereka dikenakan biaya dan waktu mereka ingin menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah daerah mereka harus membeli bahan bakar sendiri”.*

Masalah anggaran bagi para petani merupakan hal yang sangat krusial. Hal ini membuat taraf hidup masyarakat tani belum sejahtera yang akan terus hidup di bawah kemiskinan. Rendahnya bantuan modal mempengaruhi tingkat produktivitas bagi usaha tani. Maka dari itu, menurut penulis peran pemerintah desa Kedung Banteng sebagai fasilitator terkait dengan permodalan dapat dikatakan kurang maksimal. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah desa sedang berusaha untuk membuat pengajuan perencanaan yang dianggarkan di APBdes sesuai dengan kebutuhan para anggota Gapoktan.

Dalam Peneliti Terdahulu dari [6] berjudul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi” mengenai fasilitas dan kurangnya perhatian dari Kepala Desa. Penelitian sebelumnya menggunakan indikator yang sama. Dalam mewujudkan peranan sebagai Fasilitator sudah dikatakan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran meskipun tidak sepenuhnya dikatakan maksimal. Terkait dengan pembeda dengan yaitu peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan para anggota tani. Peneliti terdahulu melakukan rapat setiap seminggu sekali guna untuk membahas fasilitas yang dibutuhkan peta.

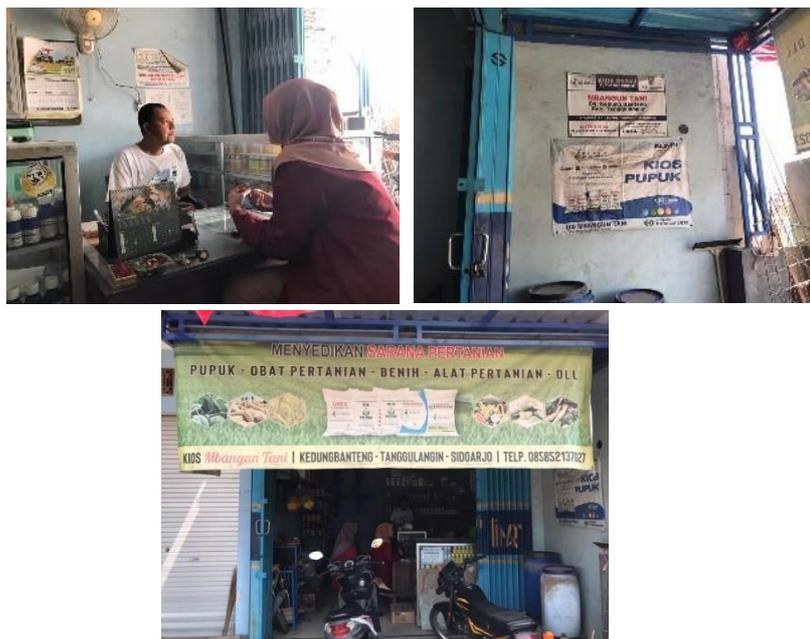
peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai pelaku utama yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting sebagai katalisator pembangunan tatanan Masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan. Pemerintah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kerja sama ini berfungsi untuk memudahkan pemerintah dan para anggota Gapoktan jika ingin membutuhkan sesuatu yang berhubungan dengan kesuburan tanaman padi. Atas kerja sama antara keduanya sampai saat ini sudah berjalan dengan baik dikarenakan terkait dengan kerja sama dengan penjual kios pupuk sudah berjalan sangat lama. Penting juga diperhatikan adalah kesiapan pemerintah desa dalam menyediakan modal bagi kelompok tani. Menurut Bapak Didik selaku Kepala dusun didesa Kedung Banteng pemerintah desa bahwasanya:

“ Pemerintah desa sudah melakukan kerja sama terkait dengan subsidi pupuk dengan kios yang bertempatan di Kedung Banteng dan jika untuk kerja sama yang lainnya tidak ada dikarenakan pemerintah desa sudah menyerahkan kebutuhan pupuk kepada anggota gapoktan ke pemilik kios pupukv ”.

Menurut peneliti terkait dengan ujaran yang dikatakan Bapak Didik selaku pemerintah desa, peneliti membenarkan perkataan beliau yang dimana kerja sama yang dengan pemilik kios pupuk merupakan kerja sama yang paling tepat dikarenakan para anggota gapoktan pasti membutuhkan pupuk untuk bibit padi yang sudah ditanam agar tanaman padi semakin meningkat. Pemberian pupuk pada tanah dan akar tanaman dapat meningkatkan kadar unsur hara dan membuat tumbuhan pada media tanam tersebut dapat kembali tumbuh secara subur. Selain meningkatkan kesuburan pupuk juga dapat menyingkirkan hama pada tanaman [13]. Jadi bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemerintah desa guna untuk memenuhi kebutuhan kepada anggota Gapoktan sudah tepat.

Gambar 3. Kerja sama dengan pemilik Kios pupuk



Sumber :Diolah oleh penulis 20

Berdasarkan gambar di atas, peneliti telah melakukan kunjungan ke tempat penjualan kios pupuk guna mengetahui lebih detail sejauh mana tingkat kerjasama yang dilakukan oleh anggota Gapoktan dengan penjual kios yang diberikan mandat oleh pemerintah. Demi meningkatkan kualitas kerjasama dalam mengatasi kendala yang dialami oleh anggota Gapoktan. Adanya program pendampingan dan Pelatihan Pembuatan Pupuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kedung Banteng diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat petani, dimana para petani di Desa Kedung Banteng sebagian besar memiliki tingkat ekonomi, pendidikan, dan sosial yang masih rendah, yang mana hal ini merupakan rasa kepedulian pemerintah desa terhadap Gapoktan. Berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan, peneliti juga mengunjungi pemilik kios pupuk, beliau juga mengatakan bahwa:

“ Saya membenarkan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dusun bahwasanya sejak 2006 – sekarang kita masih melakukan kerja sama dikarenakan kita sebagai penyalur dan gapoktan sebagai salah satu pihak yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan ke para anggota tani dan kebetulan disini saya juga sebagai anggota gapoktan jadi saya sebagai penyedia juga penyalur jadi kalau kerja sama dengan pemerintah des akita hanyalah sebatas penyedia barang”.

Atas penyampaian tersebut terkait dengan kerja sama antara keduanya sudah maksimal dikarenakan Upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan pemilik kios pupuk sudah berjalan hingga bertahun – tahun. Terkait dengan peran pemerintah sebagai katalistor sudah patut untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan yang dialami pemerintah desa terhadap anggota Gapoktan didesa Kedung Banteng. Peneliti Tedahulu dari [6] berjudul ” Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi” menggunakan indikator yang sama. Perbedaan yang paling dominan dalam letak kerja sama yang dilakukan. Peneliti sebelumnya melakukan kerja sama terkait dengan program yang dibuat dan mendapatkan hasil yang cukup baik. Akan Tetapi, data empiris terkait kerja sama dalam peneliti terdahulu tidak dicantumkan.

IV. SIMPULAN

Dilihat dari hasil dan pembahasan yang didapatkan setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam memberdayakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan dibutikan dari pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, serta berbagai pelayihan yang menjadi penunjang petani di Desa Kedung Banteng. Penulis menyimpulkan terkait peran dari pemerintah desa tersebut telah terlaksana dengan baik dengan masih dapat lebih dimaksimalkan kembali. Apabila merujuk dari UU No.6 Th. 2014 mengenai Desa serta PP No. 19 Th. 2013 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani, peran sebagai regulator belum terlaksana dengan maksimal hal ini disebabkan terdapat banyak anggota GAPOKTAN yang mengeluh serta merasa pemerintah desa belum memberikan banyak bukti nyata. Peran sebagai dinamisator sudah cukup optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan pemerintah yang berupaya mengajukan anggaran kepada dinas serta memfasilitasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani melalui adanya pembinaan. Selain itu, telah diadakan penyediaan bibit tanaman serta pelatihan dalam membuat pupuk. Akan tetapi, sebagai fasilitator, peran pemerintah masih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan terkait dengan bantuan modal yang berhubungan dengan bahan bakar mesin yang digunakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pemerintah masih kurang perhatian, walaupun telah menyediakan sarana prasaran penunjang lainnya dan juga traktor. Beberapa kendala yang terjadi tersebut menjadi alas an kesejahteraan pada masyarakat tani belum bisa terwujud dan menyebabkan petani terus menerus hidup dalam kemiskinan. Sebagai katalisator, pemerintah sudah berperan dengan maksimal dikarenakan upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan pemilik kios pupuk sudah berjalan hingga bertahun – tahun. Terkait dengan peran pemerintah sebagai katalistor sudah patut untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan yang dialami pemerintah desa terhadap anggota Gapoktan didesa Kedung Banteng

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. M. E. E, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian Di Indonesia," vol. 2, no. 2, pp. 93–100.
- [2] A. Parawangi *et al.*, "PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PADI DI DESA PARUMPANAI KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR," vol. 2, 2016.
- [3] D. Denpasar, "Seminar Nasional Pengembangan Agribisnis 2018".
- [4] I. Prasetyo *et al.*, "Discipline and work environment affect employee productivity: Evidence from Indonesia," *Int. J. Entrep.*, vol. 25, no. 5, pp. 1–32, 2021, doi: 10.20944/preprints202105.0112.v1.
- [5] Lu'Luil Maknun, "PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF," 2021.
- [6] M. Viki *et al.*, "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN," vol. VII, no. 01, 2022.
- [7] M. Andri, M. Rafie, H. Budiman, and A. I. Huda, "The Role of Village Government in Overcoming Environmental Pollution Caused by Tofu Factory Waste," vol. 2, no. 1, pp. 38–48, 2023.
- [8] N. (2019), "Analisis Mengelola Brand Image Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 2019.
- [9] P. Hewan, I. Tahu, D. A. N. Pasar, and D. I. Kecamatan, "PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK RUMAH SLAUGHTERHOUSES , TOFU INDUSTRY ," 2015.
- [10] D. I. Kabupaten and L. F. R. (2020) Utara, "Peran Pemerintah Desa Sebagai Regulator, Dinamisator, FASILITATOR DAN KATALISATOR | Public Administration Journal," vol. 3, no. 1, pp. 32–40, 2020.
- [11] A. R. S. Sambiran² and I. Sumampow³, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow," *J. Gov.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–9, 2021.
- [12] M. O. ANDRIANI, "PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA MELALUI KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM (CBT)," 2023.
- [13] R. Kurniawati, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima," vol. 3, no. 1, 2019.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.